

**FENOMENA DESA PERBATASAN DI SAJINGAN BESAR  
STUDI KASUS TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM KOTA TERPADU MANDIRI DI DESASEBUNGA  
KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSIKALIMANTAN BARAT**

**Abelnus** : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak  
Email: Abelnus\_fisipuntan@yahoo.com

**ABSTRAK**

Permasalahan yang paling fundamental yang muncul dalam pembangunan Program pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga ialah tidak jelasnya anggaran dari pemerintah, baik anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun dari pemerintah daerah. Sehingga peneliti menemukan di lapangan bahwa pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga yang telah dilaksanakan tidak terwujud, atau dapat dikatakan sebagai Program gagal. Tidak terwujudnya Program Kota Terpadu Mandiri tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor Anggaran, Sosialisasi, Koordinasi dan Wewenang pengelolaan. Dikatakan Program gagal dalam pelaksanaannya, karena tidak sesuai dengan perencanaan awal seperti di dalam MasterPlan Program Kota Terpadu Mandiri pada Tahun 2011. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Adapun tujuan penelitian ini, berikut: Untuk mengetahui Situasi dan kondisi infrastruktur di Desa Sebunga, Mengetahui Implementasi Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga, Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kota Terpadu Mandiri. Penulisan skripsi ini, dimaksudkan ingin mengetahui Proses Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif. Untuk Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Desa Sebunga sebagian besar mengandalkan jenis transportasi darat, jalan utama Desa Sebunga, yakni berbukit-bukit, pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri gagal. Sedangkan untuk saran adalah Sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup, Sosialisasi yang berkesinambungan, Pemerintah sebaiknya menyediakan Infrastruktur jalan, Pelimpahan wewenang yang jelas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Sambas.

Kata Kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, Program Kota Terpadu Mandiri

**ABSTRACT**

*The most fundamental problem that arises in the construction of the center of the Integrated Programme in Rural Independent Sebunga is unclear from the government budget, good budget comes from central government, or local governments. So the researchers found that the development program in the field of Integrated City Independent Sebunga village that has been implemented is not realized, or can be said as the program fails. No realization of the Independent Program Integrated City, due to several factors one of which budget factors, socialization, coordination and management authority. The program is said to fail in practice, because it is not in accordance with the initial plan as in the Master Program of Integrated Independent City in the year 2011. Based on background research, then that becomes the formulation of the research problem is: How Process Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga Subdistrict Sajingan Great Sambas district. The purpose of this study, the following: To find out the situation and condition of infrastructure in the village Sebunga, Knowing Implementation of Integrated Urban Village Independent Sebunga, Knowing the factors that affect the implementation of the Integrated City Independent. Writing this essay, intended want to know Process Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga. The research method used in this study is a qualitative method of descriptive type of research. For the conclusion of this study is that the Rural Community Sebunga largely rely on land transport, main roads Sebunga village, the rolling hills, building the Integrated Independent Cities Program failed. As for the suggestion is recommend that the government allocate sufficient budget, ongoing socialization, the Government should provide infrastructure roads, clear delegation of authority from central government to the provincial and district governments Sambas.*

*Keywords: Coordination, Implementation, Program Integrated City Independent*

## A. PENDAHULUAN

Masalah penting yang selalu muncul di Indonesia sampai saat ini adalah tidak meratanya pada sektor pembangunan. Baik pembangunan fisik maupun nonfisik, terutama seperti yang terjadi di daerah wilayah perbatasan Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Sehingga stigma Negatif terus mengalir di wilayah perbatasan yang terkesan terisolir dan terbelakang dari sektor pembangunan. Oleh karena itu, dari berbagai pihak berharap pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus untuk berupaya merealisasikan program pembangunan di wilayah perbatasan. di sisi lain juga, wilayah perbatasan merupakan garda depan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang seyogyanya harus dibangun, demi untuk meningkatkan loyalitas dan menjaga rasa nasionalisme masyarakat perbatasan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam segala sektor yang saling terkait, dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Dengan harapan terciptanya pola struktur kerja sama yang baik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini, terjawab seperti ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar yang dirasakan saat ini, seperti yang diuraikan di atas, sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah di daerah perbatasan. Maka pemerintah pusat bersamadengan pemerintah daerah kembali meluncurkan program pembangunan selain program pembangunan yang telah ada di Desa Sebunga yakni Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

Program ini merupakan bentuk lanjutan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap Desa Sebunga untuk

menjadikannya sebagai wilayah yang terbuka, maju dan menjadi sebuah perkotaan yang lengkap dengan fasilitas publik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun Program tersebut adalah Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dipusatkan di desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Program Kota Terpadu Mandiri mempunyai konsep dan semangat serta visi misi untuk menjadikan suatu wilayah yang dianggap masih terisolasi, tertinggal dan belum maju, menjadikannya sebagai wilayah yang terbuka, maju bahkan menjadikannya sebagai pusat kota (*city central*) yang lengkap dengan fasilitas publik dan modern berdasarkan perkembangan zaman (*globalisasi*).

Namun seiiiring dalam perjalanan pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga kecamatan sajingan besar tersebut, yang dilaksanakan sejak 2010 lalu banyak mengalami hambatan di lapangan, yang paling fundamental adalah disebabkan beberapa faktor seperti, ketidakjelasan anggaran, tidak adanya sosialisasi, lemahnya koordinasi dan masalah wewenang pengelolaannya dari pemerintah, sehingga tampak tidak adanya kemauan politik yang kuat (*political will*) terutama dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah berupaya memfasilitasi pembangunan Kota Terpadu Mandiri seperti menyediakan lahan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Akibat ketidakjelasan anggaran dan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, mengakibatkan masalah yang sangat fatal dampaknya. Karena berdampak pada tidak terwujudnya pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga atau dikatakan sebagai program yang gagal dilaksanakan. Gagalnya pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri tersebut, disebabkan oleh seperti *pertama* Tidak jelasnya status kepemilikan lahan, *Kedua* Belum tersedianya pembangunan infrastruktur

jalan yang memadai, *Ketiga* Belum di bangunanya fasilitas publik yang diperlukan dalam pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian diarahkan pada: “situasi dan kondisi infrastruktur di desa Sebunga, implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kota Terpadu Mandiri”.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep baru terhadap masalah yang di ajukan dalam perumusan masalah dan idetifikasi penelitian, berikut:(1) Mengetahui Situasi dan kondisi infrastruktur di Desa Sebunga, (2) Mengetahui Implementasi Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga, (3) Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kota Terpadu Mandiri.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### B.1. Kajian Pustaka

Adapun menurut Erna Febru Aries (2008 dalam [www.scribd.com](http://www.scribd.com)) kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris yang menumbuhkan gagasan dan mendasari usulan penelitian.

#### 1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Winarno, 2008: 146) mengemukakan “ Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan”. Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implemetasi kebijakan publik selanjutnya Fadillah Putra, (2003:81) menspesifikasikan proses implementasi kebijakan publik yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi barudan staf pelaksana.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standart operating procedurs/ SOP*).
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas/badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Ripley dan Franklin (1982:4) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sesuai dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Winarno, 2008: 146) mengemukakan “ Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan”. Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implemetasi kebijakan publik selanjutnya Fadillah Putra, (2003:81) menspesifikasikan proses implementasi kebijakan publik yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi barudan staf pelaksana.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standart operating procedurs/ SOP*).
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas/badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Subarsono, (2005: 101) menganalisis implementasi program-program pemerintah yang

bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak program, berikut;

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi.
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan publik yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Menurut Subarsono (2006:89) mengatakan bahwa: “kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.”

Menurut Blumer (dalam Sastropetro, 1990:108) mengemukakan ciri-ciri publik berikut: (1). Dikonfrontasikan atau dihadapkan pada suatu isu; (2) Terlibat dalam diskusi mengenai isu tersebut; (3). Memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatur isu. Menurut Dunn (dalam Tachjan, 2008:13-14) yang mengungkapkan bahwa:

“Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang yang tak terwujud yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik (Dunn, 1994:58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak

dapat dipisahkan atau diukur sendirian.”

## 1.2. Koordinasi

Menurut Handoko (2003: 195), mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Ada beberapa alasan fundamental mengapa koordinasi penting dalam tahapan implementasi kebijakan publik:

1. Koordinasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan publik sebuah program. Keadaan ini penting karena mempengaruhi efektivitas dan keharmonisan gerak langkah dari para pelaksana kebijakan.
2. Koordinasi akan menumbuhkan kesatupaduan tindakan dan metode, karena tanpa koordinasi para agen pelaksana kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri menurut versi mereka masing-masing.
3. Koordinasi memungkinkan *sharing of information* dari para pelaksana. Ini artinya suatu kejelasan yang penting tentang berbagai hal, perlu di bahas bersama untuk mencari alternatif yang akan ditempuh untuk mensukseskan suatu kegiatan (Badjuri dan Yowono, 2002: 120).

Sedangkan menurut E. F. L. Brech dalam bukunya *the Principle of Management* yaitu: Koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan

keselarasaan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Hal ini diperkuat lagi oleh G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/ teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Farland (dalam Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Senada dengan, Handoko (2003: 195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Selanjutnya Handoko (2003: 196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Handoko (2003:196) juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bago organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dari permasalahan serta untuk melihat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga. Menurut Riduwan (2005:51) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang menekankan pada paradigma definisi sosial. Peneliti berusaha memahami dan menginterpretasi perilaku

manusia melalui analisis percakapan dari informan. Selanjutnya di dalam paradigma definisi sosial ini, peneliti akan memulai setiap wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan serta berinteraksi secara langsung, sehingga dapat menggali dan menggambarkan fenomena secara utuh dalam fokus kajian ini.

Proses wawancara diselenggarakan dalam suasana interaksi bebas, sehingga tercipta hasil penelitian yakni, pada Proses Implementasi Program kota terpadu mandiri di desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Peneliti tertarik pada pemahaman bagaimana interaksi yang dilakukan oleh informan dalam melaksanakan program Kota terpadu mandiri. Untuk memperoleh data dan informasi lengkap maka peneliti melakukan langkah berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mempelajari teori dan konsep dari literature buku, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan sekaligus sebagai landasan teori untuk mempertajam analisis.
2. Penelitian lapangan (*itahct*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung fakta yang ada di lapangan atau lokasi peneliti, untuk mendapat data secara langsung dan informasi pada objek penelitian dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Yang berisi laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan serta surat keputusan yang dianggap relevan dengan objek peneliti.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara dapat dijelaskan di dalam pembahasan berikut:

#### D.1 Situasi Dan Kondisi Infratraktur Desa Sebunga

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada (13/Oktober-2013), Kondisi jalan utama Desa Sebunga berbukit-bukit dan tergolong baik untuk kategori jalan Negara. Akan tetapi untuk

jalan Kabupaten dan jalan Desa sangat tidak memadai. Begitu halnya dengan kondisi infrastruktur jalan dari Desa Sebunga dan jalan Rute Pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang belum juga memadai. Panjang jalan darat dari Desa Sebunga dengan jalan pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri ini, yang menghubungkan ke pusat wilayah Kota Terpadu Mandiri yang sedang dibangun tersebut, sekitar dua belas kilo meter (12 km). Dengan rincian tujuh kilo meter jalan tanah (7 km), tiga kilo meter jalan batu, (3 km), dua kilo meter jalan aspal. Sedangkan menurut fungsinya terdapat seratus persen jalan Kabupaten (100%). Jika dilihat secara makro, sesungguhnya jalan nasional yang menghubungkan Desa Sebunga menuju Ibukota Kabupaten Sambas saat ini kondisinya sepanjang sembilan puluh kilo meter (90 km) sungguh riskan kondisinya, sebab kondisinya dalam keadaan rusak berat. Sebagian besar pada ruas jalan tersebut merupakan jalan yang setengah jadi, belum beraspal, bahkan berlapis tanah.

Sesuai dengan uraian fakta di atas, menurut Giddens (di dalam Morissan (2009:57) mengemukakan bahwa setiap tindakan atau perilaku akan menghasilkan sesuatu yang baru (*fresh act*), yaitu sesuatu yang baru yang dikembangkan bersumber dari tindakan atau perilaku sebelumnya. Karena menurut Giddens setiap tindakan perilaku yang dilaksanakan kelompok atau organisasi selalu dipengaruhi oleh sejarah atau pengalaman masa lalu yang digunakan sebagai referensi untuk memahami aturan dan sumber daya apa yang akan digunakan di dalam sistem tersebut. Dalam membangun permulaan suatu yang baru, kita akan selalu menjadikan masa lalu sebagai referensi dalam melaksanakan aturan dan harapan dalam memandu atau membimbing perilaku kita. Jadi, kita tidak bias lari dari sejarah, karena sejarah terus-menerus mempengaruhi keputusan kita terhadap perilaku kebijakan dalam melaksanakan suatu pembangunan yang baik oleh organisasi.

Kondisi ini berbanding terbalik, dengan kondisi jalan dari Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas menuju wilayah Malaysia yang sangat baik, bahkan bisa dilewati oleh kendaraan berat roda 16. Dari Desa Sebunga menuju Khucing Ibukota Negeri bagian Sarawak Malaysia hanya memerlukan waktu tempuh 1 jam. (*Sumber: Data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Oktober 2013*).

## **D.2. Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga**

Berdasarkan wawancara peneliti pada (11/Oktober-2013) dengan kepala bidang Transmigrasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas, Pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri atau (KTM) di wilayah transmigrasi pada hakekatnya merupakan pembangunan yang terintegral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan yang mempunyai kategori daerah terisolir dan tertinggal dari sektor pembangunan, diharapkan kedepannya adanya program tersebut, dapat meningkatkan kesejahteraan para pemukim di wilayah transmigrasi dan masyarakat sekitar (lokal).

Selain itu, Program Kota Terpadu Mandiri merupakan gabungan program dari Program transmigrasi dan Program Kota Terpadu Mandiri atau (KTM), melalui Program KTM dirumuskan berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam rangka untuk membangun suatu kawasan perbatasan. Kawasan transmigrasi juga akan diartikan sebagai kawasan budidaya agribisnis, dengan fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan, berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Pengembangan Transmigrasi atau (LPT). (*Sumber: data Dinas sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas Oktober 2013*).

Berdasarkan uraian di atas, menurut Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Winarno, 2008: 146) mengemukakan “ Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan”. Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implementasi kebijakan publik selanjutnya Fadillah Putra, (2003:81) menspesifikasikan proses implementasi kebijakan publik yang memiliki elemen-elemen, berikut:

- e. Pembentukan unit organisasi baruan staf pelaksana.
- f. Penjabaran tujuan ke - dalam berbagai aturan pelaksana (*standart operating procedurs/ SOP*).
- g. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas/badan pelaksana.
- h. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen utama yang ditonjolkan, yaitu pengambilan kebijakan (*policy-making*) tidaklah berakhir pada saat kebijakan dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan. Standar dan sasaran implementasi kebijakan publik didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian implementasi kebijakan publik. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan publik. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

### **D.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar**

Pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, akhirnya tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasinya. Jika dikelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga menjadi dua kelompok, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Menurut Blumer (1962: 32) Teori interaksi simbolik menguraikan, tentang kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya.

Sedangkan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar adalah dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga adalah:

1. Faktor Anggaran
2. Faktor Sosialisasi
3. Faktor Lemahnya Koordinasi
4. Ketidakjelasan Wewenang Pengelolaan

Berdasarkan wawancara peneliti pada (11/Oktober-2013) dengan Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas dan pengamatan peneliti di lapangan faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan pelaksanaan atau implementasi pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga ialah, berikut:

1. Desa Sebunga (pemukiman kampung-kampung di desa

- sebunga) masih tergolong Desa terisolasi dan terpencil
2. Terbatasnya penguasaan lahan oleh masyarakat Desa Sebunga
  3. Rendahnya Sumber daya manusia di Desa Sebunga
  4. Penolakan Masyarakat Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar terhadap Pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri
  5. Program Kota Terpadu Mandiridinilai tidak tepat sasaran dan Tidak bersifat Mendidik (*Education*)
  6. Kebijakan pemerintah Terkesan Aksesoris
  7. Program Kota Terpadu Mandiri dituding Sebagai ajang Proyek

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparaan dari hasil penelitian dan pembahaasan, maka dapat dibuat kesimpulan penelitian berikut:

### E.1. Kesimpulan

#### 1.1 Kondisi Infrastruktur Desa Sebunga

Masyarakat Desa Sebunga sebagian besar mengandalkan jenis transportasi darat, meskipun terdapat akses transportasi sungai. Dalam melakukan segala aktivitas rutinnya, seperti mengangkut hasil pertanian, berbelanja, dan keperluan sosial lainnya. Sedangkan Kondisi jalan utama Desa Sebunga, yakni berbukit-bukit dan tergolong baik, untuk kategori jalan Negara. Akan tetapi untuk akses jalan Kabupaten menuju Desa Sebunga mengalami rusak parah dikala musim penghujan. Begitu halnya dengan kondisi jalan dari Desa Sebunga menuju Pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri atau (KTM) yang sampai saat ini belum dibangun dikarenakan belum memiliki anggaran.

#### 1.2 Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga

Pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri atau (KTM) telah dicanangkan akan dibangun berbagai

sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan, perkantoran layanan masyarakat, sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, wisata, tempat ibadah, permukiman dan kawasan usaha serta budidaya berbasis potensi sumber daya alam setempat dengan konsep agribisnis. Namun pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri, tak kunjung selesai, bahkan telah dipastikan gagal dilaksanakan oleh pemerintah. Program yang secara langsung dikomandoi oleh Departemen Transmigrasi tersebut. Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga, merupakan salah satu program Kota Terpadu Mandiri yang gagal dilaksanakan di provinsi Kalimantan Barat, oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selain di Desa Sebunga yang gagal dilaksanakan, juga ditemukan seperti di Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah dan Kecamatan Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya juga mengalami nasib yang serupa.

#### 1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga adalah, faktor internal dan eksternal berikut faktor internal

1. Tidak jelasnya sumber anggaran yang membiayai pembangunan pusat Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar dari pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Sambas.
2. Tidak dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah terkait dalam pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri, kepada masyarakat di Desa Sebunga.
3. Lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten Sambas maupun pemerintah pusat.
4. Ketidakjelasan Wewenang Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri, membuat Pemerintah

daerah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak berani mengambil wewenang tersebut. Selain itu, ditambah lagi, tidak adanya landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mengikat.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, berikut:

1. Masih adanya pemukiman kampung-kampung di desa sebunga yang tergolong kampung terisolasi dan terpencil.
2. Terbatasnya penguasaan lahan oleh masyarakat setempat, diakibatkan oleh masuknya perkebunan sawit skala besar.
3. Rendahnya sumber daya manusia di Desa Sebunga berdampak pada pola pikir masyarakat.
4. Terjadinya Penolakan, Program dinilai tidak tepat sasaran, kebijakan yang terkesan aksesoris dan dipandang ajang proyek bagi pemodal dan penguasa. Sehingga Masyarakat Desa Sebunga Kecamatan Sajingan mengambil sikap apatis terhadap pembangunan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.

## E.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin menyampaikan saran berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup sebelum pemerintah melakukan kegiatan pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM).
2. Sosialisasi yang berkesinambungan antar unit adalah harus Pemerintah Kabupaten Sambas dan pemerintah serta jajarannya lakukan, sebelum

melakukan aktivitas pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga.

3. Pemerintah sebaiknya menyediakan Infrastruktur jalan terlebih dahulu, demi suksesnya pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.
4. Pelimpahan Wewenang harus jelas dalam Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, W. John. 1998. *Qualitative inquiry and research design*. California sage publications.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye Thomas R. 1992. *Understanding public policy (seventh Edition, prentice Hall, Englewood Cliffs*. New jersey.
- Fermana, Surya. 2009. *kebijakan publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Giddens, Anthony. 1984. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. University of California Press, USA.
- Handayani, Soewarno, 1991. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemn*. PT. Gunung Agung: Jakarta.
- Handoko, T. Hani (2003), *Manajemen*. Edisi kedua. Cetakan kedelapan belas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. SP. 2007. *Manajemen Dasar pengertian Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Seri policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Manuwiyoto, Mirwanto, 2004. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Jakarta Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya.

- Mustopadidjaja. AR.. 2002. *Manajemen proses kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*, jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mukti, Affan, 2003. *Transmigrasi Sebagai Objek Lander form Indonesia*, Digitezed By. USU digital library
- Rahardjo, Mudjia 2010. *Jenis dan metode penelitian kualitatif*. <http://mujiaraharjo.com>. Download: 20 Maret 2011. 19.00 pm
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*. Jakarta, Penerbit, CV. Rajawali.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997  
*Tentang Ketransmigrasian*
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999  
*Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*
- Keputusan Bupati Sambas Nomor 291  
*Tentang Penetapan Lokasi Pusat*

Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Desa Sebunga.

#### **Sumber Internet**

- [Http://www. Kota Terpadu Mandiri. Org.](http://www.kota-terpadu-mandiri.org) com. 27 Maret 2011. Jam 10 pm
- [http://www. Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Sambas Kecamatan Sajingan Besar. Org.](http://www.kota-terpadu-mandiri-kabupaten-sambas-kecamatan-sajingan-besar.org) com. 27 Maret. Jam 10 pm
- [Http://www. Transmigrasi.](http://www.transmigrasi.go.id) 28 Januari Tahun 2011. Jam 8 pm
- sumber data: *Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas Tahun 2013*
- Sumber data: *Monografi Kecamatan sajingan besar semester 2 Tahun 2013*
- Sumber data: *Monografi Desa Sebunga semester 2 Tahun 2013*
- Sumber data: *Disertasi pengukuhan Guru besar Prof. Dr. Edy Suratman Tahun 2010*





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ABELMUS  
NIM / Periode lulus : E-0110806/2014  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAN  
E-mail address/HP : Abelmus\_fisipuntan@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika \*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Fenomena Desa Berkawasan di Sijungka Besar Studi Kasus:  
tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Cofa terhadap masyarakat  
di desa Selongga Kecamatan Sijungka Besar Kabupaten  
Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

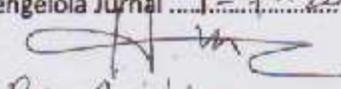
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

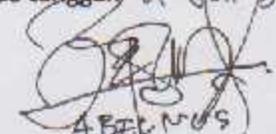
- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal ..... 01 Juli 2014  
  
Dr. Anjin  
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 01 Juli 2014  
  
( ABELMUS )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).